## KPK MATI DEMOKRASI TERHENTI

#### Ada Udang di Balik Batu Revisi UU KPK

Bagai operasi senyap. Hari ini DPR RI tiba-tiba akan melaksanakan rapat Paripurna, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Setelah beberapa kali revisi ditolak. Kini DPR di ujung masa jabatannya, ingin memandulkan dan membonsai KPK.

Apapun alasannya, revisi UU KPK belum diperlukan. KPK masih on the track dalam pemberantasan korupsi (Sugama, 2014).

Jika kalangan DPR beralasan, bahwa revisi UU KPK tersebut untuk memperkuat fungsi dan kewenangan KPK. Semua itu bohong dan salah besar. Revisi UU KPK hanya akal-akalan untuk melemahkan KPK.

## LEMAHNYA OPOSISI MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI

## Apa Kabar Oposisi

Istilah oposisi, di negara yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia, memang tidak lazim. Oposisi, hanya dikenal di negara, yang menganut sistem pemerintahan parlementer (Johnson, 2002).

Di negara yang menganut sistem parlementer. Partai pemenang (*the ruling party*), akan menjadi partai penguasa, dan yang kalah akan menjadi oposisi (Horowitz, 2013). Mereka akan berhadaphadapan. Di ruang sidang parlemen pun, kursinya dibuat berhadaphadapan.

Indonesia, menganut sistem presidensial setengah hati. Presiden sangat kuat. Dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Tapi takut dijatuhkan oleh parlemen. Istilah "oposisi" muncul, akibat adanya partai yang kalah dalam Pemilu. Lalu mengambil sikap berada di luar pemerintahan.

## REKONSILIASI DAN KOMPROMI POLITIK

#### Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Pertemuan Prabowo dengan Jokowi sabtu (13/7) yang lalu, mendadak heboh. Banyak yang kaget, pura-pura kaget, atau bahkan kagetan (Erdianto, 2019). Publik menilai, pertemuan tersebut tiba-tiba dan tak direncanakan.

Namun jika kita amati secara lebih dalam, tak ada pertemuan antar tokoh atau pembesar di negeri ini, yang tanpa skenario, tanpa disetting, pasti semua sudah diatur, dan tentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasca Prabowo bertemu dengan Jokowi. Saya pun mendadak sibuk. Teman-teman media, baik televisi, online, cetak, dan radio mewawancarai saya, terkait pertemuan tersebut. Dan terkait masa depan rekonsiliasi.

# 4

## **BAGI-BAGI KEKUASAAN PARA ELITE**

#### Bagi-bagi Jatah Menteri

Pagelaran Pilpres telah beres. Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 telah ditetapkan (Santoso, 2019). Hanya tinggal menghitung bulan, Jokowi-Ma'ruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti.

Persoalan Presiden dan Wakil Presiden memang sudah beres. Namun belum dengan komposisi kabinetnya.

Partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, maupun kubu Prabowo-Sandi, sedang berburu posisi menteri (Erdianto, 2019). Partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, sedang galau dan risau, takut jatah kursi menterinya dikurangi. Karena partai oposisi, sedang ancangancang kaki, akan masuk koalisi pemerintah.

Di saat yang sama, partai-partai oposisi pun, bermanuver untuk mendapatkan posisi menteri. Walaupun semuanya bergantung

## MENTALITAS KORUP RUSAK PROSES DEMOKRATISASI

#### Menanti Kiprah DPR Anyar

Anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 telah dilantik (Zuhro, 2019). Bahkan, kedua lembaga tersebut, telah memiliki ketua. DPR dipimpin oleh Puan Maharani. Sedangkan DPD, diketuai oleh La Nyalla Mattalitti.

Wajah baru DPR telah terbentuk. Terdiri dari 575 anggota, yang terpilih dari 80 daerah pemilihan (Dapil). Dengan komposisi, 289 atau 50,26 % wajah lama (incumbent) dan 286 atau 49,74 % wajah baru (Siregar, 2019).

Harapan itu, tentu akan bertumpu pada anggota DPR baru, yang masih fresh, penuh semangat, dan antusias dalam menjalankan tugas kedewanan. Yang walaupun, masih belum banyak pengalaman, tentang persoalan keparlemenan.

## IKHTIAR MEMPERBAIKI BANGSA YANG SALAH KELOLA

#### Menata Indonesia

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka. Sudah 21 tahun reformasi berjalan. Sudah 5 kali Pemilu pasca reformasi dilaksanakan. Sudah 7 presiden bergantian memimpin republik ini. Sudah banyak tumpahan darah para pahlawan demi bangsa ini. Dan sudah kering air mata dan keringat rakyat demi negara ini.

Negeri tercinta ini butuh ditata kembali. Bangsa besar ini telah salah kelola. Bahkan cenderung dikelola dengan asal-asalan. *Miss management*. Sehingga kita gagap dalam menatap kemajuan.

Saya masih teringat dengan guyonan dosen saya di Universitas Indonesia (UI). Sang dosen merupakan seorang profesor, alumni kampus luar negeri, anggota DPR RI, dan merupakan orang hebat Indonesia dan dunia.

Dia mengatakan, "Ujang, serius sekali kamu kuliah. Emang negara ini diurus dengan serius?". Saya tentu kaget. Karena ketika itu,

## PANCASILA DAN NKRI JALAN MENUJU DEMOKRASI YANG BERKEADABAN

## Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Pagi ini saya diundang Poltekkes Negeri Bogor, untuk mengisi kuliah umum, dengan tema "Mengokohkan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa". Entah kenapa, dari sejak semalam, saya ingin menulis tentang Pancasila. Dasar Negara Indonesia. Yang akhirakhir ini mengalami degradasi.

Mengapa Pancasila perlu dikuatkan. Perlu diperkuat. Perlu dipertanggung. Perlu dibela. Perlu dijaga. Perlu dirawat. Dan perlu dilestarikan.

Karena Pancasila merupakan ideologi pemersatu, inheren dengan nilai-nilai Islam, rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ideologi jalan tengah (moderat). Tidak ke kanan. Tidak juga ke kiri. Tidak ke liberalis. Dan juga tidak ke komunis.

## DEMOKRASI DIKELABUI OLIGARKI DAN POLITIK DINASTI

#### Demokrasi yang Tak Dirindukan

Demokrasi itu anugerah. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki. Demokrasi masih tetap menjadi sistem pemerintahan yang terbaik. Demokrasi masih menjadi andalan, bagi negara-negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Demokrasi juga dipuji karena mampu memberikan kebebasan pada warganya untuk berekspresi (Lewis, 2019). Baik secara individu maupun kolektif.

Menjadi negara demokratis juga harus disyukuri. Di mana setiap kepentingan dapat bertemu. Setiap perbedaan dapat menjadi satu. Dan setiap permusuhan dan konflik dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Sistem demokrasi masih menjadi sistem yang terbaik untuk republik ini. Belum ada sistem pemerintahan lain, yang bisa

## **PENUTUP**

Demokrasi itu anugerah. Dan berdemokrasi itu rahmat. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki. Demokrasi masih tetap menjadi sistem pemerintahan yang terbaik. Demokrasi masih menjadi andalan, bagi negara-negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Demokrasi juga dipuji karena mampu memberikan kebebasan pada warganya untuk berekspresi. Baik secara individu maupun kolektif.

Menjadi negara demokratis juga harus disyukuri. Di mana setiap kepentingan dapat bertemu. Setiap perbedaan dapat menjadi satu. Dan setiap permusuhan dan konflik dapat diselesaikan dengan musyawarah. Dengan berdemokrasi perbedaan bisa disatukan. Dan semua kepentingan dapat diakomodir.

Sistem demokrasi masih menjadi sistem yang terbaik untuk republik ini. Belum ada sistem pemerintahan lain, yang bisa